



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JANUAR
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 82359

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.694.000.000**

1. Tanah Seluas 94 m2 di IKAN KAKAP, KOMPELK ANGKATAN LAUT RT. RW. Kode Pos. , [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 94.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/129 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/144 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/216 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 394.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, SUZUKI DSXR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
5. MOBIL, HRV MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 353.165.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	101.284.338
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.542.449.338
III. HUTANG	Rp.	174.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.368.449.338

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.